

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) PADA KELOMPOK
NELAYAN DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Sebagai Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Publik*



**RIFKI HIDAYAT
05200/2008**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelompok Usaha Bersama "KUBE" Pada Kelompok
Nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang
Pariaman

Nama : Rifki Hidayat

Bp/Nim : 2008/05200

Program Studi : Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

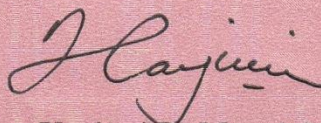
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd.
NIP. 19490614 197503 1 002

Pembimbing II



Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si
NIP. 19630617 198903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

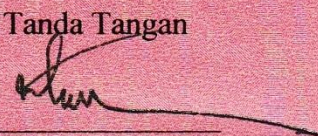
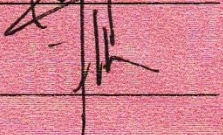
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang**

Pada Hari Kamis, 10 April 2014 Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB

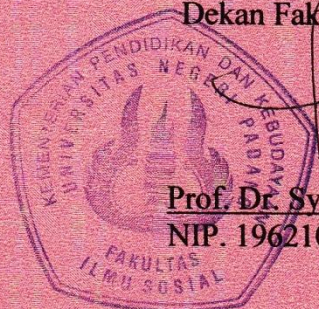
**Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha
Bersama "KUBE" Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis
Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : Rifki Hidayat
Bp/Nim : 2008/05200
Program Studi : Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

	Nama	Tim penguji	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd.		1. 
Sekretaris	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si.		2. 
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D		3. 
Anggota	: Dra. Alrafni, M.Si		4. 
Anggota	: Dra. Fatmariza, M.Hum		5. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tugas akhir berupa skripsi dengan judul **"Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman"**, asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Mei 2014

Yang membuat pernyataan,



Rifki Hidayat
Rifki Hidayat
NIM 2008/ 05200

ABSTRAK

RIFKI HIDAYAT : 05200/2008.IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELOMPOK
USAHA BERSAMA “KUBE” PADA KELOMPOK
NELAYAN DI KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah adalah dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu usaha nyata dalam penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia yang berefek jangka panjang. Tujuan dari program Kelompok Usaha Bersama adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan informan ditentukan secara purposive sampling. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja, Kelompok KUBE dan masyarakat sekitar kelompok KUBE. Uji keabsahan data dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan atau triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, display data dan penarikan kesimpulan selama proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengadaan perahu fiber, mesin dan alat tangkap telah terlaksana dan digunakan oleh nelayan anggota Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Tiap kelompok KUBE menerima Bantuan Berupa 1 unit perahu fiber 5 meter, mesin Suzuki 25pk dan alat tangkap. Total bantuan yang diberikan adalah 30 unit perahu beserta mesin dan alat tangkap. Implementasi program KUBE tidak efektif dalam memberdayakan masyarakat kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dalam hal meningkatkan kesejahteraan dari sisi ekonomi mereka melalui peningkatan hasil tangkapan. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga tidak efektif dalam mendidik masyarakat nelayan di kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman untuk bekerjasama secara kelompok dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program KUBE ini adalah minimnya SDM yang berpendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat, kebiasaan melaut serta minimnya komunikasi dan pengawasan pemerintah terutama dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai penyelia yang membimbing para anggota KUBE dalam menjalankan organisasi dan pemecahan masalah serta kendala yang dihadapi. Upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas program KUBE ini juga tidak optimal, pemerintah hanya melakukan pemantauan laporan keuangan pada sekretaris-sekretaris KUBE dan tidak terjun kelapangan menjalin komunikasi dengan masyarakat dan anggota KUBE untuk mengetahui kelangsungan implementasi program tersebut. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan, komunikasi dan juga bimbingan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan semangat dan kesadaran mereka dalam implementasi program KUBE.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. M. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
3. Ibu Dra. Jumiati , M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
4. Bapak Drs. M. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing Akademik

5. Bapak Drs. Karjuni Dt Maani dan Bapak Dr.H Helmi Hasan. M.Pd selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs. M. Syamsir, M.Si, Ph.D, Ibu Dra.Alrafni,M.Si dan Ibu Dr.Fatmariza,M.Hum selaku tim penguji.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan pegawai di program studi Ilmu administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan yang bernilai.
8. Teristimewa untuk orang tuaku: Ibunda dan ayahanda tercinta, dan juga Kakak-kakakku tercinta serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi. Dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2008 dan seniorku yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Maret 2013
Penulis

RIFKI HIDAYAT
NIM. 05200/2008

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Fokus Penelitian	7
F. Tujuan penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori.....	9
1. Konsep Implementasi Program	9
2. Model-model Implementasi	15
3. Konsep Pemberdayaan	21
4. Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	23
B. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Informan Penelitian.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	40
1. Temuan Umum.....	40
2. Temuan Khusus.....	45
B. Pembahasan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian.

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan kesehatan dan interaksi sosial. Jumlah Penduduk Indonesia menurut data BPS per September 2012 sebanyak 28,59 juta jiwa.

Para ahli ilmu sosial berpendapat bahwa, salah satu ukuran yang melahirkan kemiskinan dalam masyarakat adalah karena persoalan ekonomi, maka kemiskinan menurut ahli ilmu sosial tersebut terbagi kepada tiga unsur :

- a. Kemiskinan yang disebabkan oleh aspek badaniah atau karena mental seseorang. Kemiskinan ini disebabkan oleh kecacatan fisik maupun mental dari lahir yang menyebabkan seseorang tidak dapat beraktifitas secara normal dan menyebabkan mereka mengemis dan meminta-minta.

- b. Kemiskinan disebabkan karena bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami dll. Kemiskinan ini ditimbulkan karena bencana alam yang meluluhlantakan harta seseorang/sekelompok orang serta dapat juga menyebabkan kecacatan fisik sehingga menyebabkan kemiskinan.
- c. Kemiskinan Buatan. Kemiskinan buatan merupakan kemiskinan struktural yang ditimbulkan dari struktur-struktur ekonomi, sosial dan kultur secara politik. Kemiskinan seperti ini biasanya memandang kemiskinan hanyalah sebagai nasib dan juga merupakan takdir Tuhan.

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyatnya. Kekayaan alam yang berlimpah ini menjadi potensi besar untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Semua ini berkaitan dengan peran pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat mengarahkan masyarakatnya menjalankan usaha bersama dalam menjalankan usaha. Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar di berbagai bidang, baik bidang sosial ekonomi, kependudukan maupun lingkungan hidup. Semuanya ini akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut adalah semakin banyaknya penduduk miskin di Indonesia.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat miskin. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan, dan juga merupakan suatu proses mencapai

efisiensi dan kontribusi yang dilakukan oleh individu-individu dengan luar biasa. Pemberdayaan akan efektif dilakukan oleh pengusaha, pimpinan dan kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan budaya kerja yang baik.

Wiliani (2004) melihat konsep pemberdayaan terkait dengan pembangunan masyarakat, dengan pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) yang merupakan suatu proses yang berkaitan dengan usaha, antara lain: (1) masyarakat dan pihak lain (diluar sistem sosialnya), (2) meningkatkan integrasi masyarakat kedalam suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, (3) mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami masalah di dalam kehidupannya, (4) mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, daya masyarakat dan sebagainya. *Community development* membantu masyarakat dapat menolong diri sendiri. Oleh karenanya, dalam program pengembangan masyarakat keadaan orang-orang dalam hal ini anggota masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok perlu dikembangkan yang mendorong pertumbuhan masyarakat untuk berkembang lebih baik lagi karena masyarakat yang mengetahui apa dan bagaimananya pembangunan yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka, dan dengan nilai luhur yang dimiliki masyarakat tersebut akan melahirkan kerjasama atas dasar budaya dan potensi masyarakat itu sendiri. Salah satu pembangunan seperti ini yang diterapkan Pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Padang

Pariaman dengan program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Kelompok Usaha Bersama adalah himpunan dari keluarga keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama, membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berintraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama (Depsos RI, 2005).

Program KUBE ini dimulai sejak tahun 2009 di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. KUBE terdiri atas 10 Orang kepala keluarga (KK) yang telah terpilih melalui Keluarga Binaan Sosial, adanya kemauan anggota KUBE untuk bekerja secara kelompok dan adanya kesamaan minat dari anggota untuk melaksanakan suatu jenis usaha melalui kegiatan kelompok. Suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari sepuluh kepala keluarga tersebut akan diberikan bantuan dana melalui sub program yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk memulai usaha sesuai dengan minat dan kondisi lingkungan sekitar yang dalam hal ini adalah masyarakat pesisir pantai yang idientik dengan usaha sebagai nelayan. Setelah melalui beberapa tahap persyaratan dan penyeleksian kelayakan usaha maka pemerintah melalui Dinas Sosial setempat akan mencairkan dana bantuan modal pada KUBE yang diiringi dengan berbagai penyuluhan dasar dalam memulai usaha dan aturan teknis dari KUBE itu sendiri. Program KUBE diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinanserta melindungi fakir miskin dan kelompok yang mengalami

kemiskinan sementara akibat negatif krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta menumbuhkan kembali semangat kebersamaan yang menjadi ciri bangsa, membangkitkan keswadayaan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja sesuai kemampuan dan keinginan masyarakat yang menjalaninya.

Pada implementasinya, program ini menuai beberapa kendala di lapangan dimana tidak sesuai dengan target dan tujuan yang diharapkan. Adapun beberapa kendala yang terjadi adalah, belum terlihat peningkatan kesejahteraan nelayan peserta KUBE dan hasil tangkapannya, hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya pasokan ikan untuk daerah Tiram tersebut dimana kawasan tiram ini adalah kawasan wisata kuliner yang cirikhasnya ikan. Pada waktu-waktu tertentu pihak rumah makan di daerah tiram membeli ikan ke daerah lain, bahkan sampai-sampai nelayan dari Sibolga yang memasok ikan untuk rumah makan daerah tersebut. Hal ini sangatlah miris dan menimbulkan masalah turunan lainnya timbul akibat kurang berkembangnya hasil tangkapan dan peningkatan kesejahteraan, maka beberapa kelompok nelayan ada yang menjual ataupun menyewakan kapal beserta mesinnya kepada nelayan di daerah lain, semacam daerah Pesisir Selatan.

Bedasarkan uraian diatas penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai **“Implementasi program pemberdayaan masyarakat kelompok usaha bersama (KUBE) pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman ”.**

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar Belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Belum efektifnya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanya.
- b. Minimnya pengembangan dan optimalisasi hasil tangkapan nelayan.
- c. Belum terlihatnya peningkatan dari kesejahteraan nelayan dari program KUBE yang dilaksanakan.
- d. Terjadinya pengurangan jumlah KUBE yang aktif dari waktu ke waktu dan KUBE yang tidak aktif menjual fasilitas KUBE berupa perahu dan mesinnya, beberapa di jual serta disewakan ke daerah lain.

2. Pembatasan masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman pada masa 3 tahun terakhir program KUBE berjalan.

3. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi kurang efektifnya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini dalam meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?
- c. Apa upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman
- c. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

D. Tujuan Penelitian

- a. Mendiskripsikan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman
- c. Mengetahui upaya pemerintah dalam mengoptimalkan impementasi program Kelompok Usaha Bersama KUBE di Kec. Ulakan Tapakis Kab. Padang Pariaman.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep ilmu pengetahuan yang terkair dengan kebijakan publikdan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Manfaat praktis, hasl penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memberi masukan terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal
3. Bagi peneliti, sebagailandasan untuk melakukan penelitian yang lebih memudahkan, yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.Konsep Implementasi Program

Anderson merumuskan pengertian kebijakan sebagai suatu perilaku sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Anderson, 1994:2). Pada dasarnya, suatu program kebijakan meliputi penyusunan acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam wujud tata cara yang harus dituruti dalam pelaksanaan atau patokan yang harus diadakan pada keputusan-keputusan atau program yang kongkret yang dijalankan dalam jangka waktu tertentu.

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat atau untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat mengenai kebijakan publik yang dikemukakan oleh Moestopadidjaja, sebagai berikut:

“Kebijakan publik pada dasarnya adalah keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, negara dan pembangunan”. (Mustopadidjaja, 2003:5)

Kebijakan tersebut dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga kebijakan tersebut disebut kebijakan publik.

Fokus perhatian dari kebijakan publik tidak akan terlepas dari pelaksanaan proses kebijakan. Proses kebijakan secara garis besar oleh Shafritz dan Russel, terdiri atas:

1. Penetapan agenda (identifikasi isu kebijakan)
2. Keputusan kebijakan (diputuskannya suatu kebijakan atau tidak)
3. Pelaksanaan
4. Evaluasi program atau analisis dampak
5. Umpan balik, yang mengarah pada perbaikan atau penghentian (Shafritz dan Russel, 97: 49)

Kebijakan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah mengatur suatu hal dalam bidang tertentu, terutama bidang yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik.

Isu – isu serta permasalahan praktis yang timbul dan berkembang dalam masyarakat suatu negara merupakan masalah yang wajib dipecahkan oleh pemerintah. Sebagai administrator, pemerintah harus melakukan tindakan untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan kemasyarakatan yang timbul tersebut yaitu dengan diberlakukannya kebijakan - kebijakan publik. Maka dari itu, Administrasi Publik berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Sesuai dengan pendapat menurut Pfiffner dan Presthus yang mengemukakan bahwa

“Administrasi Negara adalah suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara”. (Handyaningrat, 1994 : 3)

Selain itu terdapat beberapa pakar lainnya yang mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan bidang kajian dari Administrasi Publik, yang dikutip oleh Thoha mengemukakan bahwa :

1. *White mendefinisikan Administrasi Publik sebagai berikut: "Public Administration consist of all chose operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy."* (Thoha, 2002:71)
2. *Pfiffner dan Presthus yang merumuskan Administrasi Publik sebagai berikut: "Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy."* (Thoha, 2002:71)

Berdasarkan uraian–uraian di atas, dapat dilihat bahwa Administrasi Publik dan Kebijakan Publik memiliki hubungan yang erat, dimana administrasi publik tidak dapat berjalan semestinya dan tidak mampu mencapai tujuan tanpa adanya kebijakan publik.

Ripley dan Franklin(dalam Budi Winarno,2007:145-146) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran nyata. Menurut Ripley dan Franklin, implementasi mencakup banyak kegiatan. **Pertama**, badan-badan pelaksana yang ditugasi Undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan mentah serta uang. **Kedua**, badan-badan pelaksana

mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan kongkrit, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. **Ketiga**, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Pelaksanaan atau implementasi kebijakan dalam konteks manajemen berada dalam kerangka organizing-leading-controlling. Ketika kebijakan sudah dibuat, tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Menurut Riant Nugroho D(2006:137-139) ada 4(empat) tepat yang perlu dipenuhi untuk efektivitas implementasi kebijakan yaitu.

1. Apakah kebijakan itu sendiri sudah dinilai tepat, yakni bisa memecahkan masalah, dan apakah kebijakan itu telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah, serta apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan karakter kebijakan.
2. Tepat pelaksanaannya, aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksananya, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Tepat target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.

Namun kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak dikendalikan oleh orang-orang atau institusi yang memang berkompeten untuk melakukan pengendalian terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Riant Nugroho D (2006:147) setiap kebijakan harus dikendalikan dengan cerdas dan efektif agar tujuan kebijakan tercapai. Pengendalian dapat dilakukan melalui:

1. Organisasi pemerintah atau negara
2. Organisasi masyarakat, seperti LSM, yayasan sosial budaya
3. Organisasi media massa seperti koran, majalah, televisi, dan sebagainya
4. Organisasi bisnis seperti asosiasi pengusaha
5. Organisasi politik seperti partai politik
6. Organisasi kuasi negara, seperti Badan Regulator, Komite Penanggulangan korupsi
7. Tokoh masyarakat, melalui jaringan atau secara individual.

Dengan demikian implementasi dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dengan dimonitor dan dievaluasi tetapi juga perlu dikendalikan dengan baik.

Bila di elaborasi pendapat dari Riant Nugroho D (2006: 137-139) tentang syarat yang harus dipenuhi untuk efektifitas implementasi kebijakan, maka

Program KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja hendaknya :

1. Dapat memecahkan masalah dan dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan karakter kebijakan. Bila dilihat realita dilapangan berdasarkan hasil survey awal, maka program KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman di Kecamatan Ulakan Tapakis belumlah sepenuhnya memecahkan masalah dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan dengan membentuk kelompok usaha yang diberi bantuan dana untuk memfasilitasi usaha berupa perahu dan motornya untuk hasil tangkapan ikan yang lebih optimal. Dilihat disisi lain, program ini dibuat oleh Kementrian Sosial RI yang memang berkompeten dibidang pemberdayaan masyarakat.
2. Tepat pelaksanaannya, dilihat dari aktor implementasi ini sudah tepat dan sesuai dimana terdapat tiga aktor dalam implementasi program KUBE ini yakni Dinas Sosial, Kelompok Nelayan dan LKM.
3. Ketepatan target. Pada implementasinya ketepatan target yang diintervensi belum tercapai dimana peningkatan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan belum signifikan.
4. Tepat lingkungan. Pada point ini implementasinya belum lah terlaksana secara maksimal dimana lingkungan interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan belum

berjalan lancar dan berakibat pada tingkat efisiensi implementasi program.

2. Model-Model Implementasi

Menurut Riant Nugroho D(2006:127-135 model implementasi tersebut pertama,model Donald Van Metter dan Carl Van Horn(1975), model kedua adalah model Mazmanian dan Paul A.Sabatier(1983), model ketiga adalah model BrianW Hoogwood dan Lewis A Gun(1987), model keempat adalah model Merilee S Grindle (1980) model kelima adalah model Richard Elmore(1979), Michael Lipsky(1971), dan Benny Hjern & David O'Porter(1981).

Darikelima model diatas, akan ditentukan satu model yang berada dimekanisme paksa, satu model yang berada dimekanisme pasar, dan satu model yang menggabungkan mekanisme paksa. Model yang dipilih adalah:

Pertama adalah model yang berada mekanisme paksa, yaitu model Merilee S Grindle. Terletak di kuadran puncak ke bawah dan lebih berada di mekanisme paksa. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya, bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut. Isi kebijakan itu mencakup :

1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya terdapat tiga hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan,kepentingan dan strategi aktor terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Kepatuhan dan daya tangkap

Model Grindle ini memiliki beberapa kelebihan yaitu:

1. Tujuan yang bersifat umum telah terinci secara tegas
2. Program aksi dirancang dengan jelas
3. Pemisahan proses formulasi dan proses implementor
4. Sumber dan besarnya dana pada untuk program aksi telah ditentukan
5. Keputusan yang dibuat pada saat rancangan dijadikan tuntutan dalam proses.

Dari beberapa kelebihan yang dimiliki model ini,juga ada terdapat kelemahannya, antara lain:

1. Dengan adanya pemisahan proses formulasi dan implementor menimbulkan kesulitan untuk mengadakan perubahan tujuan dan arah kebijakan yang telah ditentukan.
2. Aturan-aturan yang telah diputuskan tidak selamanya sesuai dengan kenyataan dalam praktek.

Kedua adalah model yang berada dimekanisme pasar yaitu model Richard Elmore, Benny Hjern & David O'Porter. Model ini dimulai dari pengidentifikasian jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan

menanyakan kepada mereka tentang tujuan, strategi, aktivitas dan kontrak yang mereka miliki.

Model implementasinya didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakan atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran bawah. Karena itu, kebijakan yang harus sesuai dengan harapan dan keinginan publik yang menjadi target kliennya dan sesuai juga dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan (LSM).

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa program KUBE termasuk dalam model mekanisme pasar dimana kebijakan yang dibuat untuk mendorong masyarakat untuk memilih dan menjalankan implementasinya sendiri, tentunya dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah untuk membantu pencapaian tujuan dan juga membantu penyelesaian kendala yang dihadapi.

Ketiga adalah model yang berada di mekanisme paksa dan mekanisme pasar, yaitu model Brian W Hoogwood dan Lewis A Gun. Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan minimal 10 (sepuluh) syarat, sebagai berikut:

1. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga / badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu

3. Syarat ketiga berkenaan dengan,apakah perpaduan-perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Syarat keempat,apakah kebijakan yang akan mengimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal
5. Syarat kelima,seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi.Asumsinya semakin sedikit dalam kebijakan maka semakin tinggi pula hasilnya yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut untuk bisa dicapai. Sebaliknya bila hubungan kausalitas bertambah kompleks maka secara otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.
6. Syarat keenam, apakah hubungannya saling ketergantungan kecil. Asumsinya jika hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya jika hubungan saling ketergantungan sangat tinggi, maka implementasinya tidak berjalan efektif
7. Syarat ketujuh, adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Syarat kedelapan, adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan kedalam urutan yang benar.
9. Syarat kesembilan, adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna.komunikasi adalah perekat organisasi,dan koordinasi adalah terbentuknya team work yang sinergis
10. Syarat kesepuluh, bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepetuhan yang sempurna.

Model yang berada dimekanisme paksa dan mekanisme pasar ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu:

1. Sistem administrasinya terpadu
2. Otoritas tunggal untuk mengendalikan organisasi
3. Tujuan, aturan/prinsip yang tegas dan seragam
4. Diatur secara mekanistik

Sedangkan yang menjadi kelemahan dari model ini adalah

1. Tertutup bagi unit-unit dibawah untuk menafsirkan yang lain
2. Tidak ada bargaining
3. Mengalami kesulitan jika melibatkan pelaksan yang cukup banyak
4. Bersifat otoritatif.

Menurut Syahrin Naihasy (2006:133) pada dasarnya teknik dan model implementasi adalah:

“Kebijakan berpola top to bottom(atas ke bawah)versus bottom to top(bawah ke atas) dan pemilihan implementasi yang berpola pada command and control(paksa)dan economic incentive(mekanisme pasar.)”

Menurut Riant Nugroho D(2006:137-139) ada 4(empat) tepat yang perlu dipenuhi untuk efektivitas implementasi kebijakan yaitu.

1. Apakah kebijakan itu sendiri sudah dinilai tepat,yakni bisa memecahkan masalah,dan apakah kebijakan itu telah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah,serta apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Tepat pelaksanaannya, aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksanaannya, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
3. Tepat target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
4. Tepat lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan yaitu lingkungan kebijakan, yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dan lembaga lain yang terkait.

Namun kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak dikendalikan oleh orang-orang atau institusi yang memang berkompeten untuk melakukan pengendalian terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Riant Nugroho D (2006:147) setiap kebijakan harus dikendalikan dengan cerdas dan efektif agar tujuan kebijakan tercapai. Pengendalian dapat dilakukan melalui:

1. Organisasi pemerintah atau negara
2. Organisasi masyarakat, seperti LSM, yayasan sosial budaya
3. Organisasi media massa seperti koran, majalah, televisi, dan sebagainya
4. Organisasi bisnis seperti asosiasi pengusaha
5. Organisasi politik seperti partai politik

6. Organisasi kuasi negara, seperti Badan Regulator, Komite Penanggulangan korupsi
7. Tokoh masyarakat, melalui jaringan atau secara individual.

Dengan demikian implementasi dapat berjalan dengan baik, tidak hanya dengan dimonitor dan dievaluasi tetapi juga perlu dikendalikan dengan baik.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa program KUBE termasuk dalam model mekanisme pasar dimana kebijakan yang dibuat untuk mendorong masyarakat untuk memilih dan menjalankan implementasinya sendiri, tentunya dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah untuk membantu pencapaian tujuan dan juga membantu penyelesaian kendala yang dihadapi.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat :

Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Definisi pemberdayaan dapat dilihat dari tujuan, proses dan cara pemberdayaan (Suharto, 2005) : Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Winarni (1998) mengungkapkan bahwa arti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*Enabling*), memperkuat potensi atau daya (*Empowering*) dan terciptanya kemandirian. Berdasarkan pendapat tersebut berarti tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi pada masyarakat yang masih terbatas juga dapat dikembangkan sampai mencapai kemandirian.

Menurut Ife (Suharto,2005) mengatakan pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah, kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas kesejahteraan.

Pada penerapannya, pemberdayaan masyarakat memiliki faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Sennet dan Cabb dan Conway menyatakan bahwa ketidak berdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. (Suharto, 1997)

Tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Julistiyani (2004:83) adalah tahapan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga merangsang kesadaran mereka tentang perlunya perbaikan kondisi serta pemberian pengetahuan penyuluhan atau pelatihan serta pemberian dana kepada keluarga yang tergolong pra sejahtera. Berangkat dari beberapa pendapat para ahli tentang konsep dan faktor pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki kompleksitas yang tinggi

dalam penerapannya dimana dituntut adanya potensi dari individu atau kelompok yang akan diberdayakan dan para penguasa yang memiliki keinginan dan program yang mendukung dalam pemberdayaan serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan agar tercapainya tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Berangkat dari kedua konsep ini, maka dapat dilihat korelasi yang sangat kuat dimana satu sama lain saling mendukung. Kebijakan yang dalam hal ini adalah program pemberdayaan tidaklah memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan program itu sendiri apabila implementasi dari program itu sendiri tidak dijalankan dengan benar, sebaliknya juga apabila program (kebijakan) itu sendiri kurang matang dalam hal perencanaan baik dalam hal penyusunan dan regulasi, maka akan timbul juga masalah-masalah pada implementasi program dilapangan, hal ini diakibatkan karena adanya ruang yang diberikan sistem untuk kesalahan tersebut, maka dari itu kedua hal ini saling bergantung satu dengan yang lain agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

4. Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama adalah himpunan dari keluarga-keluarga yang tergolong miskin dengan keinginan dan kesepakatan bersama, membentuk suatu wadah kegiatan, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berintraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

(Depsos RI, 2005).

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk dikelola dan diolah serta dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dengan memberikan bantuan alat ataupun sarana pendukung operasional kegiatan usaha masyarakat.

Pada Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memberikan bantuan perahu fiber, mesin dan alat tangkap kepada anggota KUBE untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ulakan Tapakis sesuai dengan sumberdaya alam yang ada.

Tujuan dari program Kelompok Usaha Bersama(KUBE)secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Secara khusus program ini bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin
2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin
3. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin, terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha dalam penganggulanagn kemiskinan.
5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

Sasaran program ini adalah keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki mata pencaharian tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air bersih, kesehatan dan pendidikan). Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala atau anggota yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas kependudukan, mempunyai usaha atau berniat usaha, usia produktif dan mempunyai keterampilan, mampu bertanggung jawab sendiri dan bersedia mematuhi aturan KUBE.

Landasan hukum pelaksanaan program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama meliputi :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
5. Peraturan pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 2001 dan Nomor Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/PENGHUK/2002 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI

Sebuah KUBE dalam pelaksanaan kegiatannya mengalami beberapa tahap, berdasarkan kriteria tahapan perkembangan KUBE dari Dinas Sosial, maka tahap perkembangannya sebagai berikut, (Andayasari, 2006)

1. Tahap Tumbuh

- a. Sudah ada pendamping KUBE (Pembina Usaha dan Aparat Desa)
- b. Pernah mengikuti pelatihan
- c. Pengurus dan organisasi KUBE telah dibentuk sebanyak 10 orang
- d. Sudah menerima bantuan permakanaan
- e. Sudah menerima bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif)
- f. Kegiatan kelompok baru berjalan

Pada fase penumbuh, dana bantuan modal yang diberikan senilai 20 juta rupiah.

2. Tahap Berkembang

- a. Kegiatan kelompok dijalankan sesuai dengan kepengurusan
- b. Keuntungan EUP sudah ada untuk kesejahteraan anggota dan IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial)
- c. Kepercayaan dan harga diri anggota KUBE dan keluarga meningkat
- d. Pergaulan antar anggota KUBE dan masyarakat sudah semakin positif
- e. Hasil usaha sudah didapat

Pada fase pengembangan yang sebelumnya telah melalui fase penumbuh, akan diberikan dana bantuan tambahan untuk pengembangan modal usaha senilai 30 juta rupiah melalui standar kelayakan diatas.

3. Tahap maju/mandiri

- a. Keuntungan UEP meningkat sehingga modal semakin besar
- b. Mampu menyisihkan dana IKS untuk anggota kelompok keluarga miskin lainnya dan berpartisipasi dalam pembangunan desa.
- c. Manajemen UEP sudah dikelola dengan baik
- d. Hubungan bisnis dan lembaga ekonomi dan pengusaha baik dan menguntungkan
- e. Hubungan sosial dengan masyarakat dan lembaga sosial sudah semakin baik dan melembaga.
- f. Kegiatan UEP semakin maju dan berkembang

Untuk fase ini yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dana bantuan diberikan senilai 250 juta rupiah yang telah melalui standar kelayakan yang tertera diatas.

1.Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha Ekonomi Produktif adalah program Kementerian Sosial yang dibentuk dalam KUBE sebagai cara dan media pendukung dalam pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama. Kube adalah sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan) memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi

dan sumber sosial, ekonomi local, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan pihak terkait. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi.

2. Mekanisme Pelaksanaan Program terpadu KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) :

LKM adalah Lembaga Keuangan Mikroyang terbentuk dari KUBE-KUBE yang ada di wilayah KUBE yang bersangkutan, Pendamping, LSM dan Instansi terkait (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota) di wilayah masing- masing untuk mendorong mengembangkan usaha ekonomi Usaha Ekonomi Produktif anggota KUBE dalam rangka penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. LKM berfungsi menghimpun dana dari berbagai sumber seperti bantuan pemerintah, pengusaha dan pihak ketiga, dana dari lembaga lainnya, dana titipan, bantuan masyarakat perorangan atau kelompok dan dari sumber lainnya. Dana ini haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemberdayaan kelompok-kelompok KUBE di wilayah tersebut sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui keterpaduan KUBE dan LKM, dilakukan dengan proses sebagai berikut:

A.Tahap Persiapan

1. Sosialisasi

- Sosialisasi bertujuan member penjelasan program dan menggalang komitmen dan berbagai instansi terkait maupun pelaku pembangunan lainya agar mendukung gerakan penanggulangan kemiskinan di daerahnya.

- Sosialisasi dilaksanakan ditingkat provinsi yang diikuti oleh instansi terkait dan pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan mitra kerja lainnya.

2. Kajian Wilayah dan Analisis Sosial Ekonomi

- Kajian wilayah untuk mengidentifikasi kelembagaan sosial ekonomi yang ada dilokasi kegiatan, potensi, peluang dan sumberdaya pengembangan usaha mikro serta mengenal kegiatan keuangan mikro yang ada dilokasi kegiatan.
- Kajian wilayah dan analisa sosial okonomi dilaksanakan oleh pendamping dengan melibatkan masyarakat setempat melalui pendekatan Participatory Rurral Appraisal (PRA) atau pendekatan - pendekatan yang sesuai lainnya.

3. Kordinasi dan Pendekatan Individu

- Kordinasi dan pendekatan individu dilakukan untuk memperoleh dukungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada disekitar lokasi program.

4. Kontrak Sosial

- Kontrak sosial dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari berbagai pihak yang terkait mengenai pelaksanaan program kegiatan.
- Warga masyarakat sepakat untuk bergabung dalam wadahKUBE dan LKM

- Kontrak sosial dilakukan bersama antara pemerintah, pendamping, keluarga fakir miskin calon anggota KUBE.

B. Tahap Pembentukan KUBE

Pembentukan KUBE dilakukan dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi Keluarga Miskin

- Dimaksudkan untuk mendapatkan data keluarga fakir miskin sebagai calon peserta proram
- Identifikasi keluarga miskin dilakukan oleh pendamping

2. Sosilalisasi program kepada keluarga miskin

- Merupakan upaya menyebarluaskan informasi tentang konsepsi, tahapan kegiatan dan syarat keikutsertaan dalam program dengan harapan calon peserta program memahami konsepsi dan ketentuan program
- Sosialisasi dilaksanakan oleh pendamping calon anggota KUBE

3. Penilaian calon

- Dilakukan untuk mengklarifikasi dan memastikan kelayakan data keluarga yang telah didapat dari kegiatan identifikasi serta untuk menyeleksi dan menentukan calon peserta program.
- Penilaian dilaksanakan oleh pendamping dengan kunjungan langsung ketempat tinngal keluarga fakir miskin untuk melihat kondisi tempat tinggal dan kondisi sosial ekonomi.

C. Pra Latihan Wajib Kelompok (Pra LWK)

Merupakan kegiatan pemantapan menjelang dilaksanakannya Latihan Wajib Kelompok bagi anggota KUBE.

1. Pra LWK dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh anggota KUBE

dengan tujuan untuk :

- Menjelaskan secara mendalam program
- Memantapkan tekad dan niat
- Mematangkan proses LWK
- Mengevaluasi kesiapan peserta untuk mengikuti LWK
- Menentukan waktu dan tempat LWK

D. Latihan Wajib Kelompok (LWK)

1. Merupakan kegiatan untuk membentuk dan mempersiapkan anggota KUBE dalam mengikuti pelaksanaan program

2. LWK dilaksanakan dengan tujuan untuk

- Membentuk kelembagaan kelompok
- Memperkenalkan mekanisme penyaluran dana bergulir
- Menyusun dan menetapkan usulan usaha kelompok.

3. LWK dilaksanakan 5 hari berturut-turut selama 1 jam setiap harinya pada waktu dan tempat yang sama.

Mekanisme Pemberian Bantuan Modal UEP KUBE:

1. Kelompok menyusun dan mengajukan Rencana Usulan Kebutuhan Usaha (RUKU) atau Proposal singkat dan membuat/menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Bantuan (SPPB)
2. Seleksi dan evaluasi RUKU/Proposal oleh pendamping (utusan dari nagari atau desa setempat yang bekerjasama dengan dinas sosial sebagai pendamping KUBE)
3. Pengajuan RUKU layak kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten
4. Pemberian rekomendasi oleh Dinas/Instansi Sosial Kabupaten
5. Pembukaan rekening Bank masing-masing KUBE
6. Pengajuan ke Provinsi oleh Dinas Sosial untuk pengeluaran dana.
7. Pencairan dana di Bank oleh KUBE dengan terlebih dahulu mengajukan rencana penggunaan dana (RPD) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten setempat.
8. Persetujuan Pencairan dan penggunaan dana bantuan modal KUBE oleh Dinas Sosial Kabupaten, merupakan pendelegasian kewenangan pengawasan penggunaan bantuan tersebut dari Dinas Sosial Provinsi kepada Dinas Sosial Kabupaten setempat.
9. Untuk penggunaan dana dalam pengadaan UEP sesuai dengan RUKU yang telah ditetapkan oleh KUBE tidak diperbolehkan diintervensi pihak manapun untuk kepentingan pribadi.
10. Pertanggungjawaban dan pelaporan KUBE oleh pengawas pendamping

11. Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), untuk penguliran dana guna pengembangan jumlah anggota KUBE.

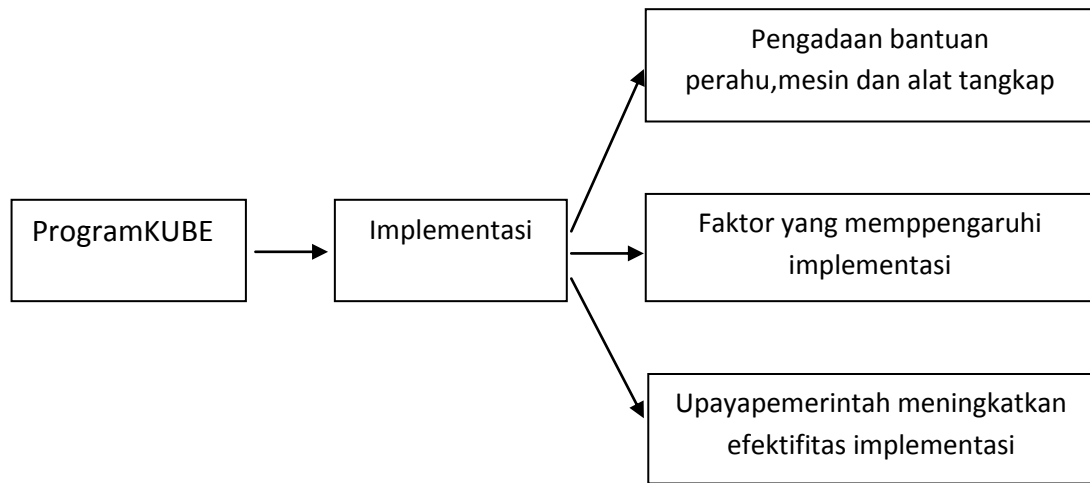
Hasil yang diharapkan dari program ini adalah Fakir Miskin mengerti, memahami dan melaksanakan perannya sebagai individu, keluarga, anggota kelompok masyarakat yang berfungsi dan mampu berbuat secara produktif dan dapat meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan antara konsep yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk memudahkan penelitian, sebuah kerangka konseptual disusun berdasarkan kepada kerangka teoritis. Ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan perumusan masalah. Keterkaitan maupun hubungan variabel antara variabel yang diteliti diuraikan dengan berpijak pada kajian teori diatas.

Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana implementasi dari suatu kebijakan dilaksanakan dalam hal ini mencakup tentang ukuran dasar tujuan dari kebijakan tersebut, langkah-langkah kebijakan apa yang diambil, siapa aktor pelaksananya, apa sasaran dari kebijakan tersebut, dari mana sumber dananya, bagaimana prosedur pelayanannya dan bagaimana implementasi kebijakannya dan tanggapan aktor yang terdiri dari pengurus.

Dari uraian tersebut serta kaitannya dengan kajian teori mengenai kebijakan maupun implementasi kebijakan. Maka penulis dapat menggambarkan kerangka konseptual mengenai “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat ‘KUBE’ (kelompok usaha bersama) Pada Kelompok Nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kab, Padang Pariaman ” sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dibuat beberapa kesimpulan bahwa:

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat Kelompok Usaha Bersama pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman secara umum gagal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberdayaan masyarakat Kelompok Usaha Bersama pada kelompok nelayan di Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman adalah minim sumber daya manusia yang berpendidikan dan pengalaman berorganisasi, kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan program KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan minimnya pengawasan dan bimbingan dari penyelia dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai penyelia KUBE. Faktor terakhir adalah budaya melaut masyarakat di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman yang berbeda dengan program dan armada yang diberikan yang menyebabkan masyarakat susah membiasakan dengan program yang baru.

3. Sebagai dinas yang diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan dan membimbing masyarakat dalam program pemberdayaan ini, tidak ada usaha yang maksimal dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman dalam hal pengawasan, komunikasi serta usaha dalam membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok nelayan di Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang akan diberikan penulis terkait efektivitas pemungutan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Pariaman yaitu:

1. Diharapkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman untuk lebih mempersiapkan diri dalam implementasi program Pemberdayaan Masyarakat dengan sangat mempertimbangkan budaya lokal, latar belakang pendidikan dan kebiasaan masyarakat yang akan diberdayakan serta melakukan usaha-usaha optimalisasi implementasi program.samsat untuk dapat meningkatkan kinerja lebih optomal lagi, sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang tidak mengetahui tentang pajak progresif
2. Diharapkan kepada masyarakat yang mendapat kesempatan tergabung dalam program pemberdayaan hendaknya lebih memahami dan sadar akan kesempatan mereka untuk lebih meningkatkan kualitas hidup serta

bersungguh-sungguh menjalankan program tersebut demi masa depan yang lebih baik.

3. Diharapkan adanya upaya komunikasi yang berkelanjutan dan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat yang diberdayakan agar implementasi program pemberdayaan masyarakat berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Daftar Pustaka

- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Depsos RI, 2005. *Kelompok Usaha bersama*. Jakarta.
- Dinsosnaker Kab. Padang Pariaman, 2009. *Panduan Penyuluhan Kelompok Usaha Bersama*. Padang Pariaman
- Gomes, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Soewarno, Handayani, 1994, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional* Jakarta : Penerbit Haji Mas Agung.
- Lexy, Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung Edisi revisi : Remaja Rosdakarya.
- Miftah, Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Mustopadidjadja AR, 1999, *Manajemen Proses Kebijakan*, Jakarta: LAN RI
- Nugroho, Riant, & Randy, W. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Nugroho, Riant D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang (Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)* Jakarta: PT Elexa Media Computerindo.
- Sondang P. Siagian, 2003, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*.
- Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan
- Syahrin Naihasy. 2006. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Mida Pustaka

Sugiyono. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.

Abdul Rahmat. 2003. Program *Kelompok Usaha Bersama*.(<http://tesisjogja.com/web/download/p6.doc>) diakses tanggal 15 Januari 2014.

Prawirosentono. 1990. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama*(<http://www.damandiri.or.id/> file efektifitas/suwandiunair) diakses tanggal 7 November 2012